

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

*Zeny Antika, Yunika Murdayanti, Hafifah Nasution
1,2,3Universitas Negeri Jakarta

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 04 December 2020

Accepted: 20 December 2020

Published: 20 December 2020

Keywords:

*Regional Financial Accounting System,
Financial Report Accessibility, Internal
Control, Financial Accountability Of Local
Government.*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the regional financial accounting system, the accessibility of financial reports and internal controls on the accountability of regional financial management. This research is a quantitative research. The population in this study is the whole part involved in the management of regional finances in the villages in Bekasi City. The sampling technique uses simple random sampling. Data collection techniques used in this study using survey methods. The data used are primary data in the form of questionnaires distributed to respondents. The analytical method used is multiple regression analysis with SPSS (Statistical Product and Services Solution) version 26. Based on the results of the study showed that the regional financial accounting system, the accessibility of financial statements, and internal control have a significant positive effect on the Financial Accountability Of Local Government.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah pada kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan alat bantu SPSS versi 26. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

How to Cite:

Antika, Zeny, Yunika Murdayanti, dan Hafifah Nasution. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15(2), 212-232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah mempunyai upaya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah secara tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam mengelola keuangan daerah dibutuhkan standar akuntansi pemerintah yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diterima secara umum. Pelaporan keuangan yang dilakukan pemerintah harus didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai keterbukaan pelaporan (Fauziyah, 2017).

Pada pengelolaan keuangan daerah tingkat kelurahan, akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan penting agar dapat mengurangi tuduhan unsur politis dari dana kelurahan yang telah dianggarkan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alokasi dana kelurahan pada tahun 2019 diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tidak menjadi alat politik dan kepentingan pribadi. Alokasi dana kelurahan harus akuntabel dan transparan untuk laporan pertanggungjawaban keuangan kelurahan tersebut. Dana kelurahan digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang diputuskan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses pelaksanaan Musrenbang tidak lepas dari tanggung jawab kelurahan sebagai panitia dan fasilitator dalam perumusan kebijakan penetapan program yang akan dibawa ke tingkat kecamatan dan tingkat kota, dari proses Musrenbang tersebut perlu

adanya akuntabilitas dari pihak kelurahan. Akuntabilitas aparatur kelurahan sangat menentukan kebijakan yang diambil dalam Musrenbang.

Alokasi Dana Kelurahan menurut UU No. 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa 5% dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota ini diberikan untuk Kelurahan yang salah satunya adalah untuk Pemberdayaan Masyarakat. Dalam mengelola dan mengatur Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK), Perangkat Kelurahan diharuskan memenuhi beberapa prinsip sesuai dengan Perwal Nomor 34 Tahun 2015 yakni Transparansi, Akuntabilitas, Teknokratik, dan Partisipatif. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kemampuan Perangkat Kelurahan dalam mengelola AAK agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari AAK itu sendiri. Kelurahan juga merupakan satuan kecil pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena berada diwilayah masyarakat itu tinggal. Oleh karena itu, Kelurahan mempunyai hak sendiri untuk mengelola dan mengatur berbagai Anggaran Keuangan Kelurahan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Wujud dari program otonomi pengelolaan anggaran terdapat dalam bentuk Penguatan Manajemen Kelurahan. Masing-masing Kelurahan ini diberi wewenang/otonomi pengelolaan Anggaran sendiri, di mana hal ini merupakan implementasi dari konsep Otonomi Daerah.

Proses otonomi pengelolaan anggaran Kelurahan dimulai dari rencana kerja yang dibaut oleh Kasi (Kepala Seksi) yang ada di Kelurahan yang isinya mencakup Musrenbang

atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang merupakan wadah bagi aspirasi dari lapisan elemen masyarakat seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat serta mitra kerja yang berada dalam kawasan Kelurahan. Rencana Kerja Kelurahan ini kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun RKA-SKPD (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan di BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) Kota Bekasi dan dalam penyusunan RKA-SKPD ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Kelurahan tersebut. Setelah disetujui dan ketok palu, maka disebut Dana Pengguna Anggaran (DPA) yang dapat di ambil di Badan Keuangan Daerah atau DPPKD Kota.

Pengoptimalan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan pengungkapan atas kinerja keuangan pemerintah. Tuntutan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah adalah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan demi mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik (Purba & Amrul, 2017). Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang baik hal tersebut sejalan dengan aksesibilitas laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aksesibilitas memiliki keterkaitan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemudahan

bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Kurniawan & Rahayu, 2019).

Dalam mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan yang berkepanjangan dalam penggunaan laporan keuangan, maka pemerintah mensyaratkan adanya pengendalian internal yang dilakukan secara menyeluruh pada setiap lingkungan pemerintahan, baik itu di pusat ataupun daerah. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inti sari dari PP 60/2008 ini adalah terciptanya suatu sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktik-praktik *Good Governance*. Pengendalian internal memiliki tugas sebagai media evaluasi terhadap analisis varian (selisih) antara pendapatan dan belanja daerah untuk mengantisipasi tindak penyelewengan dimasa mendatang. Dengan memiliki sistem pengendalian yang baik diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan kinerjanya dan membuat pelaporan keuangan yang lebih akuntabel (Mahmudi, 2016).

Sedangkan Peraturan Pemerintah tersebut sebenarnya murni mengadopsi pendekatan dari *Government Accounting Organization (GAO)* yang menginduk kepada *Committee of*

of Sponsoring Organization of The Tradeway Commission (COSO) memiliki beberapa unsur yang dilaksanakan menyatu dan terintegrasi dari kegiatan instansi pemerintah yaitu unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Tingkat keberhasilan sistem pengendalian intern dapat diukur dari *Good Government Governance (GGG)* yang baik, yang tercermin dalam laporan kinerja pemerintahan dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, yang nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta dilanjutkan dengan keluarnya opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas, ditetapkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan PP No.12 Tahun 2019, yaitu: keandalan, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Pemenuhan terhadap karakteristik tersebut, sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban bahwa pemerintah telah mengelola dana publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan (Mahmudi, 2016).

Pada fenomena yang terjadi pada APBD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019, dari sisi anggaran memiliki kelemahan dalam pengendalian internal pembelanjaan, namun hal tersebut diantisipasi dalam proses perencanaan anggaran berupa *marking* belanja dan menggenjot pendapatan daerah secara maksimal, namun akhirnya ada kelemahan pada pengendalian internal yang menjadikan kas

daerah mengalami permasalahan. Dari permasalahan tersebut solusi yang diambil adalah merekturisasi keuangan daerah dan melakukan tunda bayar terhadap belanja langsung dan mengurangi kegiatan yang dilakukan secara besar-besaran untuk efisiensi kas daerah Hal yang menjadi perdebatan adalah program Kartu Sehat program pemerintah kota yang dianggap beban keuangan daerah paling besar, ke depannya program Kartu Sehat akan dilakukan evaluasi dan audit dengan mencari formula yang tepat dalam pelayanan ke masyarakat.

Adanya temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mengungkapkan bahwa penatausahaan kas daerah belum tertib yang mengakibatkan adanya selisih pencatatan antara bidang perbendaharaan dan pihak-pihak bank, antara lain: (1) Pemerintah Kota Bekasi belum menerapkan *Treasury Single Account* di mana Pemerintah belum melakukan transaksi secara penuh pada Bank BJB sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga terdapat rekening lain yang dikelola Badan Usaha Daerah (BUD) yang terdiri dari empat rekening penerimaan pada empat bank dan 11 rekening deposito pada tujuh bank; dan (2) Kepala bidang perbendaharaan selaku kuasa BUD tidak melakukan penatausahaan kas daerah secara tertib dalam melaksanakan penatausahaan kas daerah.

Dari kasus yang telah terjadi ini dan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merasa perlu dilakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang mana

penelitian ini nantinya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu: 1) Apakah terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 2) Apakah terdapat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?; dan 3) Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

TINJAUAN TEORI

Teori *Stewardship*

Stewardship Theory menjadi alat atau fungsi di mana informasi yang disajikan memiliki kualitas yang sebenarnya, nyata, objektif, dan terpercaya. Ini akan menimbulkan hubungan yang harmonis di antara para *stakeholders* dan informasi akuntansi menjadi lebih terpercaya yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk pembuatan keputusan terutama dalam hal fungsi pengelolaan pemerintah (*steward*), penilaian kinerja, dan menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah (Rofelawaty, 2017).

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi sektor publik karena pada dasarnya manusia adalah subjek utama yang berperan sebagai penggerak ekonomi. Dari awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang menjadi penghubung antara *steward* dengan *principals*. Harahap (2015) menyatakan bahwa teori *stewardship* atau pengabdian berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, mempunyai

integritas tinggi dan memiliki kejujuran. Dalam teori ini manajemen dipandang sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya dalam hal aksesibilitas untuk memudahkan *stakeholders* dalam mengakses informasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2019), Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik yang bersangkutan untuk dipertanggung jawabkan. Rakyat sebagai pemberi amanah pada wakilnya di DPRD memberikan tugas dan tanggung jawab agar DPRD Bersama Lembaga eksekutif untuk mengelola keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas perihal yang dipertanggung jawabkan, berdasarkan hal yang telah terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan (Renyowijoyo, 2013).

Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat empat tahapan yang dapat dilakukan (Halim, 2019), yaitu: 1) Pelaporan merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh *steward* atau pemerintah untuk mempertanggung jawabkan atau melaporkan hasil kinerjanya dalam mengelola sumber daya atau dana publik; 2) Pencarian informasi atau investigasi merupakan

kewenangan dari pemilik sumber dana atau masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola sumber dana; 3) Penilaian atau verifikasi merupakan kewenangan dari pemilik sumber dana atau masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola sumber dana; dan 4) Pengawasan merupakan tindak pengendalian yang dilakukan oleh pemilik sumber dana untuk mengawasi agar tujuan tercapai.

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Menurut Peraturan Walikota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, bahwa sumber pendanaan bagi kelurahan bersumber dari: 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi; dan 2) Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan.

Menurut Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan (Direktur DJPK), DAU Tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kelurahan. Dalam mengelola AAK diperlukan juga sistem akuntansi yang baik agar dapat menjalankan program kerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan ketentuan pemerintah daerah. Dalam penggunaan AAK diperlukan aksesibilitas yang baik agar dalam Musrenbang semua alokasi anggaran yang dimiliki kelurahan disajikan secara terbuka dan transparan. Untuk mengurangi terjadinya permasalahan, pada pengawasan dana kelurahan dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) sebagai inspektorat yang melakukan pengawasan pada dana kelurahan sehingga dana kelurahan dapat diimplementasikan secara tepat.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencarian, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan. Sistem akuntansi daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu *Single Entry*, *Double Entry* dan *Triple Entry* (Purba & Amrul, 2017).

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan (Superdi, 2017). Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Permendagri No.64 Tahun 2013, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai

dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam menjalankan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdapat beberapa indikator yang menjadi prosedur dalam menjalan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dari proses *input* hingga *output* agar berfungsi dengan baik (Superdi, 2017), yaitu: 1) Basis Akuntansi sebagai suatu kegiatan pada transaksi yang dilakukan dari pencatatan hingga pelaporan laporan keuangan; 2) Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran. Mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan pada sumber dan alokasi dana pemerintahan selama periode tersebut; 3) Penyusunan APBD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah berkenaan uang dan barang harus dianggarkan dalam APBD; dan 4) Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan PP 12 Tahun 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan keuangan.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut Wijaya, Anim, dan Sutrisna (2016) Aksesibilitas adalah kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik laporan keuangan yang

dapat dibaca dan dipahami. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Fauziyah, 2017).

Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria agar dapat dikatakan handal dan terpercaya dalam melaporkan kinerjanya berupa publikasi laporan keuangan. Berikut ini merupakan kriteria dari aksesibilitas laporan keuangan (Fauziyah dan Handayani, 2017) yaitu: 1) Keterbukaan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media masa; 2) Kemudahan, yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi keuangan daerah; dan 3) *Accessible* (mudah diakses), yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

Pengendalian Internal

Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commisions, 2013 mendefinisikan Pengendalian Internal sebagai proses yang dirancang dan dipengaruhi oleh dewan entitas direktur, manajemen, dan personel lainnya. Di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksana

roda pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran atau kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas pengendalian yang nantinya dibuat menjadi laporan hasil evaluasi dari aktivitas pengendalian dan seterusnya mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu (Angraini et al., 2016).

Mahmudi (2016) mengatakan terdapat beberapa rangka model pengembangan pengendalian internal yaitu: Pada tahun 1992 *COSO* mengeluarkan model pengendalian internal yang terdiri dari lima komponen, yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Kegiatan Pengendalian; 3) Penilaian Risiko; 4) Informasi dan Komunikasi; dan 5) Pemantauan Pengendalian Intern.

Hipotesis Penelitian

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan (Suprihastini et al., 2017). Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan daerah, termasuk laporan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintahan pusat. Hal ini membutuhkan Sebuah sistem yang baik untuk proses pencatatan, administrasi, pengelolaan dan pelaporan terkait data keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H₁: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai bentuk kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Rahma, 2017). Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik dari pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H₂: Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan sistem pengendalian intern yang tepat. Hal ini karena dalam sistem

pengendalian intern, suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel yaitu dapat dipertanggung jawabkan (Sari et al., 2017). Pengendalian pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya tindak penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai sehingga pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H₃: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner yang akan diberikan kepada responden dengan survei langsung atau menggunakan fitur *google form* dan via *dropbox* pada kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Kelurahan adalah unit dari pemerintah selaku kuasa pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan proses akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk diserahkan pada entitas pengguna anggaran yaitu kecamatan.

Kuesioner diisi oleh seluruh bagian yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Menurut Peraturan Walikota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 bagian Pengelola Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terdiri dari: 1) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan bertindak sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK); 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, yaitu Sekretaris Kelurahan atau pejabat yang ditunjuk oleh Lurah; 3) Kepala dan bagian Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan 4) Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan.

Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian ini adalah skala likert empat poin. Skala Likert dapat dijadikan alat ukur yang menyatakan sikap, argumen, dan pandangan seseorang tentang yang terjadi pada sekitarnya (Sugiyono, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah selaku (KPA) di kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Penentuan sampel menggunakan rumus *roscoe* yaitu minimal 10 dikali jumlah variabel, maka jumlah sampel dalam penelitian ini menjadi minimal 40 responden yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kelurahan yang tersebar di kelurahan Kota Bekasi.

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen dan tiga variabel independen, yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal sebagai variabel independen.

Rangkuman indikator dari setiap variabel dependen dan independen pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Rangkuman Indikator Setiap Variabel

No	Variabel	Indikator	Sumber	Butir Pernyataan
1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	a. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	Fauziyah, 2017	a. 1
		b. Akuntabilitas Proses		b. 2, 3, dan 4
		c. Akuntabilitas Program		c. 5 dan 6
		d. Akuntabilitas Kebijakan		d. 7
2	Sistem Akuntansi Keuangan (X ₁)	a. Basis Akuntansi	Superdi, 2017	a. 8
		b. Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran		b. 9 dan 10
		c. Penyusunan APBD		c. 11
		d. Penyusunan Laporan keuangan berdasarkan PP 12 Tahun 2019		d. 12 dan 13
3	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X ₂)	a. Keterbukaan	Superdi, 2017	a. 14
		b. Kemudahan		b. 15 dan 16
		c. <i>Accesible</i>		c. 17
4	Pengendalian Internal (X ₃)	a. Lingkungan pengendalian	Kawatu & Kewo 2019	a. 18
		b. Penilaian risiko		b. 19
		c. Kegiatan pengendalian		c. 20 dan 21
		d. Informasi dan komunikasi		d. 22 dan 23
		e. Kegiatan pemantauan		d. 24

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Peneliti melakukan kedua uji ini kepada 20 responden, yang berasal dari Kelurahan Sukapura, Kelurahan Cempaka Baru, dan Kelurahan Galur. Ketiga kelurahan ini berada di DKI Jakarta.

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r-tabel dan r-hitung, di mana

pernyataan dikatakan valid jika r-hitung > r-tabel. Nilai r-tabel dalam penelitian ini adalah 0,444. Terdapat 24 pernyataan yang diuji validitas, dari 24 pernyataan tersebut semua pernyataan memiliki nilai r-hitung >0,444, sehingga seluruh pernyataan ini valid dan dapat digunakan untuk penelitian ini.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel (dapat dipercaya) jika hasil nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal memiliki nilai *Cronbach Alpha* >0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kuesioner variabel dalam penelitian ini reliabel untuk dilakukan pengujian.

Deskripsi Responden

Kuesioner dibagikan kepada 40 responden, yaitu bagian yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kelurahan. Dari tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa dari 58 kuesioner yang disebar, kuesioner yang dapat digunakan untuk diolah adalah sebanyak 40 kuesioner. Tabel 2 di bawah ini merupakan tingkat penyebaran dan pengembalian kuesioner.

Tabel 2
Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang dikirim	58
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	18
Jumlah kuesioner yang kembali dan dapat digunakan	40
Persentase kuesioner yang dapat digunakan	69%

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Jumlah responden dalam penelitian ini ada 40 responden. Berdasarkan pernyataan di kuesioner didapati informasi mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, jabatan, pendidikan terakhir dan keterlibatan responden dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti yang disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Deskripsi Responden

Karakteristik	Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	20	50%
	Perempuan	20	50%
Jabatan	Lurah	4	10%
	Sekretaris Lurah	3	7,5%
	Bendahara	7	17,5%
	Kepada dan Staf Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	26	65%
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	3	7,5%
	D3/Diploma	3	7,5%
	S1	30	75%
	S2	4	10%
Keterlibatan dalam pengelolaan keuangan daerah	Ya terlibat	40	100%
	Tidak terlibat	0	

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari total skor jawaban responden disajikan pada Tabel 4

Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan uji *P-P Plots*, yaitu suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila penyebaran titik-titik pada sumbu *P Plot of regression standazzed residual* berada di sekitar

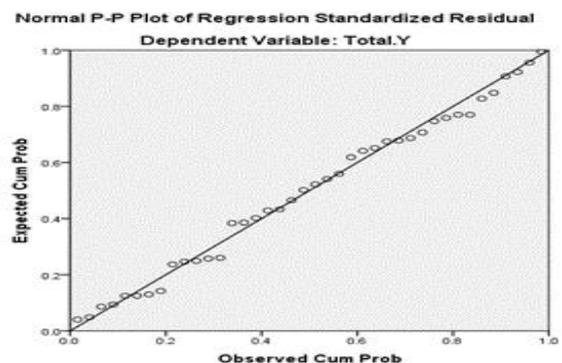
garis normal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Selain itu dapat juga dilihat dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*, yaitu suatu data dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 5% atau 0,05.

Setelah dilakukan pengujian, data dalam penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi normal karena telah memenuhi kriteria tersebut. Hasil uji normalitas data menggunakan uji *P-P Plots* dan uji *Kolmogorov-Smirnov* dari penelitian ini disajikan pada Gambar 1 dan Tabel 5.

Tabel 4
Statistik Deskriptif

	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Dev	Variance
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	40	13	15	28	22,68	2,859	8,174
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	40	9	15	24	21,23	2,069	4,281
Akseblitas Laporan Keuangan	40	7	9	16	12,73	2,230	4,974
Pengendalian Internal	40	10	18	28	23,63	2,628	6,907
Valid N (listwise)	40						

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020



Gambar 1
Hasil Uji P-P Plots

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Tabel 5
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
N	40
Test Statistic	,073
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah uji untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya. Hasil uji multikolinearitas yang baik adalah apabila nilai *Tolerance* >0,10 dan nilai *VIF* < 10, yang dapat diartikan tidak terjadinya multikolinieritas.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas

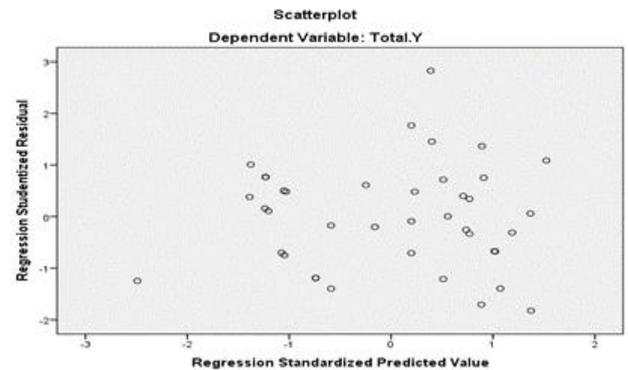
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Sistem Akuntansi	0,512	1,953
Kuangan Daerah		
Akseblitas Lap. Keu	0,391	2,557
Pengendalian Internal	0,352	2,837

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model penelitian ini. Hal ini disebabkan nilai *Tolerance* $\geq 0,10$, yaitu 0,512 untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 0,391 untuk Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan 0,352 untuk Pengendalian Internal. Sedangkan untuk nilai *VIF* ≤ 10 , yaitu 1,953 untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 2,557 untuk Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan 2,837 untuk Pengendalian Internal.

Uji Heterokedastisitas

Suatu model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi gejala heterokedastisitas, yaitu dapat dilihat dari penyebaran titik-titik pada grafik plot yang harus menyebar di atas dan dibawah angka 0 dalam sumbu Y dan penyebaran titik-titik menunjukkan pola yang tidak jelas. Hasil uji heterokedastisitas dari penelitian ini disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2
Grafik Scatterplot

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Uji heterokedastisitas juga dapat dilakukan melalui uji *glejser*. Dalam penelitian ini tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Apabila hasilnya lebih besar daripada 0,05 maka mengindikasikan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Hasil uji *glejser* dari penelitian ini disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Glejser

Model	Sig
Constant	0,825
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,101
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,828
Pengendalian internal	0,317

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai Sig. dari seluruh variabel independen adalah >0,05, yaitu dari 0,101 untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 0,828 untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan 0,317 untuk variabel Pengendalian Internal. Sehingga dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga uji, yakni uji koefisien determinasi atau (R^2), uji hipotesis parsial atau Uji t, uji hipotesis simultan atau Uji F.

Uji koefisien determinasi atau uji R^2 dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) berkisar antara nol sampai satu. Semakin dekat nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) dengan satu, maka hubungan antara variabel independen dan dependen akan semakin kuat. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,658

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Hasil *Adjusted R Square* pada uji R^2 adalah 0,658. Hal ini berarti bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan

Pengendalian Internal mampu menjelaskan 0,658 atau 65,8% dari variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sisanya sebesar 34,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji kelayakan model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dan melihat nilai signifikansinya. Nilai F tabel didapat dari nilai *degree of freedom* df_1 dan df_2 . Nilai df_1 adalah jumlah variabel independen (k) dan nilai df_2 diperoleh dari $n - k - 1$. Nilai F tabel pada df_1 adalah 3 dan df_2 ($40 - 4 = 36$) pada nilai signifikansi 0,05 adalah 2,87.

Jika F hitung > F tabel dan nilai signifikansinya < 0,05 maka seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil dari uji F disajikan pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9
Hasil Uji F

Model	F hitung	F tabel	Sig.
Regression	25,959	2,87	0.000 ^b

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Berdasarkan hasil uji F yang kita lihat dari Tabel 9 menunjukkan bahwa F hitung sebesar 25,95 lebih besar daripada F tabel sebesar 2,87 dan nilai signifikannya sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti seluruh variabel independen (Sistem Akuntansi Keuangan daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal) secara simultan atau

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah).

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya suatu variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel dan nilai signifikansinya.

Nilai t-tabel diperoleh dari nilai *degree of freedom* (df). Nilai df dihitung dengan rumus: $df = \text{jumlah responden (n)} - \text{jumlah variabel independen (k)} - 1$. Pada penelitian ini, df bernilai 36 ($40 - 3 - 1$), yaitu dari 40 responden dikurang dengan variabel independen yaitu tiga dan dikurang satu sehingga tabel t pada df 36 dengan signifikansi 0,05 adalah 2,028.

Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai signifikansinya $<$ 0,05 maka variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil dari uji t disajikan pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10
Hasil Uji t

Model	B	t hitung	t tabel	Sig	Kesimpulan
(constant)	1,011	,338		0,737	
X ₁	0,370	2,044	2,028	0,048	H ₁ diterima
X ₂	0,423	2,202	2,028	0,034	H ₂ diterima
X ₃	0,357	2,078	2,028	0,045	H ₃ diterima

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

Hasil uji t yang disajikan pada Tabel 10 di atas dapat menjadi dasar pengambilan keputusan hasil hipotesis pada penelitian ini, yaitu:

1. Hasil uji t untuk X₁ menunjukkan bahwa nilai t-hitung dan nilai signifikansi dari

variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebesar 2,044 dan 0,048, di mana nilai t hitung ini $>$ t tabelnya (2,028) dan nilai signifikansinya $<$ 0,05, yang artinya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, nilai B variabel X₁ menunjukkan nilai positif. Artinya terdapat hubungan positif antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu semakin tinggi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan semakin tinggi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kedua nilai ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah **dapat diterima**.

2. Hasil uji t untuk X₂ menunjukkan bahwa nilai t-hitung dan nilai signifikansi dari variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan adalah sebesar 2,202 dan 0,034, di mana nilai t hitung ini $>$ t tabelnya (2,028) dan nilai signifikansinya $<$ 0,05 yang artinya Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, nilai B variabel X₂ menunjukkan nilai positif. Artinya

terdapat hubungan positif antara Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Yaitu semakin tinggi Aksesibilitas Laporan Keuangan maka akan semakin tinggi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kedua nilai ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diterima.

3. Hasil uji t untuk X_3 menunjukkan bahwa nilai t-hitung dan nilai signifikansi dari variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebesar 2,078 dan 0,045, di mana nilai t hitung ini $>$ t tabelnya (2,028) dan nilai signifikansinya $<$ 0,05, yang artinya Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, nilai B variabel X_3 menunjukkan nilai positif. Artinya terdapat hubungan positif antara Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu semakin tinggi Pengendalian Internal maka akan semakin tinggi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kedua nilai ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah **dapat diterima**.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan dan dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diterima. Artinya semakin baik sistem akuntansi keuangan yang dimiliki oleh daerah dalam hal ini kelurahan maka pengelolaan keuangan daerahnya juga akan semakin akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

Suatu sistem yang berkualitas dirancang untuk memudahkan kinerja kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaporan keuangan. Suatu sistem akan berkualitas bila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu sistem yang digunakan dalam pemerintah tersebut adalah sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan. Semakin baik pemerintah, khususnya kelurahan mengelola sistem pelaporan keuangan ini maka nilai akuntabilitasnya juga akan semakin meningkat. Hasil tersebut mendukung teori *stewardship* di mana pemerintah daerah sebagai *steward* prinsip-prinsip akuntabilitas. Di mana sistem akuntansi dibuat dan dirancang untuk memudahkan proses pencatatan hingga pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Hasil penelitian ini sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Superdi (2017), Suprihastini et al., (2017), dan Angraini et al., (2016). Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Dewi Asfiryati (2017) dan Purba & Amrul (2017) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan dan dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kedua** dalam penelitian ini, yaitu Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah **dapat diterima**. Artinya semakin mudah akses atas laporan keuangan maka semakin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya.

Aksesibilitas laporan keuangan berarti kemudahan seseorang untuk bergerak dan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara wajar. Aksesibilitas laporan keuangan daerah dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan hal tersebut merupakan usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar berjalan dengan efektif dan efisien. Hasil tersebut mendukung teori *stewardship* di mana

pemerintah daerah sebagai *steward* memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniawan & Rahayu (2019), Rahma (2017), Sari et al., (2017), Fauziyah (2017), Wijaya, Anim & Sutrisna (2016), dan Fikrian et al., (2016).

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan dan dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga** dalam penelitian ini, yaitu Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah **dapat diterima**. Artinya semakin baik pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah daerah khususnya kelurahan maka semakin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya.

Akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan pengendalian internal yang tepat, karena dalam pengendalian internal, suatu instansi pemerintahan harus menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut tidak terlepas dari aktivitas pengendalian yang nantinya dibuat menjadi laporan hasil evaluasi dari aktivitas

pengendalian sesuai dengan kejadian yang relevan, handal dan tepat waktu. Hasil tersebut mendukung teori *stewardship* di mana pemerintah daerah sebagai *steward* berusaha memberikan tanggungjawab yang baik untuk melakukan pengendalian yang efektif atas pengelolaan sumber daya daerah. Dari hasil implementasi pengendalian internal yang efektif dapat menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kawatu & Kewo (2019), Rahma (2017), Sari et al., (2017), Suprihastini et al., (2017), dan Angraini et al., (2016). Namun hasil penelitian lain yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini, diperoleh dari penelitian Purba & Amrul (2017) yang menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga akan; 2) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan semakin meningkat; dan 3) Pengendalian internal

berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal yang dilakukan maka tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan akan semakin meningkat.

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut: 1) Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian pada sampel penelitian yang berbeda dengan penelitian ini dan sebaiknya responden menyebar ke lebih banyak kelurahan lain sehingga akan diperoleh sampel yang lebih banyak untuk mewakili jawaban responden terhadap akuntabilitas di kelurahan; dan 2) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain di luar dari variabel yang telah digunakan pada penelitian ini agar lebih mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti variabel penyajian laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sarini & Sutanto Edy Taufik. (2015). *Statistika Tanpa Stres* (Intan Faradillah (ed.); Cetakan Pe). Jakarta: TransMedia Pustaka.
- Angraini, D., Agusti, R., & Angraini, L. (2016). PENGARUH PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI, AKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir). *Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1178–1189.

- Fauziyah, M. R. (2017). PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 6, Juni 2017 ISSN, 6(2017), 1689–1699*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Fikriani, H., Hasan, A., & ' A. (2016). PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4(1), 265–279*.
- Harahap Sofyan. (2015). *TEORI AKUNTANSI (14th edition)*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Hasanah, Nuramalia dan Fauzi Achmad. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: In Media, 2016.
- Kawatu, F. S., & Kewo, C. L. (2019). the Factors Influencing Managerial Performance and Their Effect on Financial Accountability. *International Journal of Economics and Financial Issues, 9(5), 135–139*. <https://doi.org/10.32479/ijefi.8551>.
- Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). *KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018) THE EFFECT OF THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENT AND ACCESSIBILITY FINANCIAL STATEMENT ON REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY (Case Study in Mataram City Regional Secre. 6(1), 705–714*.
- Mahmudi. (2016). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: UII Press.
- Nazir. Moh., P. . (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Prof. Dr. Halim Abdul, M.B.A., A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi Keenam)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., C. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Mardiasmo (ed.))*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (Pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: ALFABETA.
- Prof. Ghozali Imam, M.com, Ph.D, CA, A. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. 8(1), 99–111. Vol.8 No.1 2017 ISSN:2087-4669*.
- Rahma, N. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekon, 4(2), 4309–4323*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Renyowijoyo Munindro. (2013). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Edisi 3)*. Jakarta Mitra wacana Media.
- Rofelawaty Budi, Artinah Budi, dan K. Abdul. (2017). *Teori Akuntansi (Cetakan Pertama)*. Banjar baru, Kalimantan Selatan: Scripta Cendekia.

- Sari, E., Azlina, N., & ' J. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 571–585.
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan; Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; (studi empiris pada satuan kerja; perangkat daerah Kabupaten Sijunjung) *Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia. JOM Fekon*, 4(1).
- Suprihastini, E., Akram, M. M., & Santoso, B. (2017). Effect of Regional Financial Accounting System, Internal Control Systems and Regional Financial Audit on Financial Accountability of Local Government. *International Conference and Call for Papers, Jember*, 830–852.
- Wijaya, Anim & Sutrisna, A. (2016). Determinan Aksesibilitas dan Penyajian LKD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 1, 313–32.

LAMPIRAN: KUESIONER PENELITIAN

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
1	Bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi yang telah ada dan penerapan pengelolaan keuangan berdasarkan hukum yang telah ada.				
2	Dalam penyusunan anggaran, pengelola tidak disertai dokumen perencanaan dan penganggaran yang dilaporkan kepada camat untuk diserahkan ke walikota.				
3	Proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan di periksa oleh camat dan dipertanggungjawabkan oleh walikota				
4	Penetapan batas atas penggunaan anggaran terhadap realisasi APBD.				
5	Laporan keuangan yang telah disusun dapat dijadikan tolak ukur dalam pembuatan laporan keuangan tahun selanjutnya.				
6	Laporan keuangan kelurahan disampaikan kepada walikota untuk dilakukan pelaporan.				
7	Laporan keuangan pemerintah daerah tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi.				

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

NO	PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
8	Basis akuntansi penyusunan laporan keuangan daerah berdasarkan PP 12 Tahun 2019 berbasis akrual.				
9	Unsur yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, Belanja, Pembiayaan.				
10	Laporan Realisasi Anggaran sudah mencerminkan perbandingan pendapatan dan belanja dalam satu periode pelaporan.				
11	Unsur- unsur yang terdapat dalam laporan operasional adalah pendapatan laporan operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan				
12	Dalam membuat laporan keuangan daerah, penyelenggara sistem akuntansi harus mengacu pada petunjuk teknis dari atasan.				
13	Klasifikasi belanja daerah disusun berdasarkan pada orientasi pencapaian <i>ouput</i> dan <i>outcome</i> yang diterima				

Aksesibilitas Laporan Keuangan

NO	PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
14	Laporan keuangan disajikan secara lengkap dan terbuka untuk umum.				
15	Pemerintah Daerah mempunyai sistem informasi keuangan daerah yang memungkinkan laporan keuangan dapat diakses (diketahui/ diperoleh) dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan misalnya melalui internet.				
16	Laporan keuangan dan data lainnya dapat diakses dan mudah dipahami.				
17	Laporan keuangan dan data pendukung mencakup semua informasi yang dibutuhkan.				

Pengendalian Internal

NO	PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
18	Pejabat pemerintahan telah menerapkan sikap perilaku netralitas dan independen dalam lingkungan pekerjaan.				
19	Penerapan batas sikap yang dilakukan saat bekerja dan adanya sanksi moral terhadap pihak yang melanggar batas toleransi.				
20	Melakukan tindak pengendalian sesuai dengan prosedur dan mengurangi tingkat risiko pelanggaran.				
21	Kegiatan transaksi dan aktivitas pemerintahan dipantau oleh otorisasi pihak yang berwenang.				
22	Penerapan sistem informasi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.				
23	Komunikasi antar lembaga dan individu telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif.				
24	Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi.				